

Pengentasan Kemiskinan Etnis Bajo Melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Berbasis Kearifan Lokal

Poverty Alleviation of Bajo Ethnic Through Independent Learning, Independent Campus (ILIC) Program Based on Local Wisdom

*Sam'un Mukramin, St. Haniah, Muhammad Nawir, Lukman Ismail dan Fatmawati

Universitas Muhammadiyah Makassar
Jl. Sultan Alauddin No.259, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221, Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 12 Februari 2022
Perbaikan naskah: 27 November 2023
Disetujui terbit : 20 Desember 2023

*Korespondensi penulis:
Email: muhsam_un88@yahoo.co.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v13i2.12333>



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan kemiskinan yang dialami oleh etnis Bajo dan merumuskan model strategis dalam pengentasan kemiskinan baik secara konseptual maupun praktis melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) berbasis kearifan lokal di Kabupaten Bone. Penelitian ini kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dari 9 orang informan secara *purposive*. Adapun hasil penelitian menunjukkan: 1) Mewujudkan kolaborasi melalui kemitraan dan kerjasama yang melibatkan para ahli, peneliti, dan akademisi melalui program MBKM berbasis lingkungan agar meningkatkan produktifitas berpikir, kreatif, inovatif dan adaptif untuk kesejahteraan etnis Bajo, 2) Pembentukan lembaga swadaya masyarakat cinta kepada alam berfungsi dalam pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan kemandirian desa dan nelayan, 3) Pelaksana kelembagaan baik formal maupun informal adalah pemrakarsa yang menginisiasi/mengkoordinir hasil perencanaan desa dalam meningkatnya kesadaran potensi dan kelebihan dalam bertindak bijak, 4) Menumbuhkan organisasi rakyat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan sebagai instrumen dalam perubahan paradigma serta mempraktikkan nilai-nilai baru, dalam kehidupan sehari-hari, 5) Memiliki usaha berbasis rumah tangga, berkarakteristik jenis usaha nelayan di permukiman etnis Bajo, berbahan baku hasil laut atau usaha berbahan baku bukan hasil laut, 6) Tersedianya sarana ruang produksi mikro pengolahan hasil laut, sebagai salah satu strategi menjadikan kawasan permukiman etnis Bajo kawasan pusat pengolahan hasil laut, 7) Konservasi kawasan permukiman menjadi eko wisata lokal atau nasional serta menata tempat pengolahan hasil laut agar menjadi pusat penjualan oleh-oleh khas etnis Bajo, dan 8) Sarana infrastruktur sebagai penunjang sistem sosial dan ekonomi dalam memperkuat akses pemerintah dan swasta untuk wilayah pesisir, melalui jaringan sosial masyarakat dan bermitra dengan berbagai pihak.

Kata Kunci: pengentasan; kemiskinan; MBKM; Bajo; kearifan lokal

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the problems of poverty experienced by the Bajo tribe so that they can find and formulate strategic models in poverty alleviation both conceptually and practically through the MBKM program based on local wisdom in Bone Regency. This research is descriptive qualitative with a case study approach to 9 informants with purposive sampling. The results of the study show: 1) Realizing cooperation through partnerships and cooperation involving experts, researchers and academics through the environment-based MBKM program in order to increase thinking, creative, innovative and adaptive productivity for the welfare of the Bajo tribe, 2) Formation of non-governmental organizations that love nature functions in community empowerment to foster village and fisherman independence, 3) Institutional implementers both formal and informal are initiators who initiate/coordinate the results of village planning in increasing awareness of the potential and strength in acting wisely, 4) Growing community organizations that aim to alleviate poverty and as an instrument in changing paradigms and practicing new values, in everyday life, 5) Having a household-based business characterized by the type of fishing business in Bajo tribal settlements that are made from sea products or businesses based on sea products, 6) Availability micro production space facilities for processing marine products, as one of the strategies to make residential areas of the Bajo tribe a center for processing marine products, 7) Preservation of residential areas to become local or national ecotourism and managing marine product processing areas to become sales centers for souvenirs typical of the Bajo tribe, and 8) Infrastructure facilities to support social and economic systems in strengthening government and private access to coastal areas, through social networks and partnerships with various parties.

Keywords: alleviation; poverty; MBKM; Bajo; local wisdom

PENDAHULUAN

Kemiskinan membawa berbagai dampak persoalan sosial yang menyebabkan orang miskin hidup dalam ketergantungan bahkan kriminalitas (Dulkhan & Nurjanah, 2018; Lumenta *et al.*, 2009; Mardinsyah & Sukartini, 2020). Petani dan nelayan merupakan komunitas yang tidak terlepas dari persoalan kemiskinan (Anggi, 2018; Imron, 2003). Profesi tersebut memiliki persoalan dasar yang sama yaitu masalah ekonomi yang cenderung di bawah garis kemiskinan. Bahkan nelayan merupakan kelompok masyarakat yang tergolong paling miskin (Imron, 2003).

Etnis Bajo (Bahri, 2017) merupakan entitas mitologikultural sebagai orang laut yang memiliki asal-muasal dan pola hidup di laut secara nomaden (Mukramin, 2018; Nurkholis, 2018; Susilowati, 2018; Suyuti, 2004). Mereka hanya mengandalkan hasil laut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga kondisi ekonominya tidak mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, bahkan dari generasi ke generasi. Sehingga mereka mengalami ketertinggalan dalam berbagai aspek kehidupan (Mardinsyah & Sukartini, 2020; Nyoman Ruja, 2022).

Kondisi ini terjadi juga pada etnis Bajo di Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Masyarakat Bajo di daerah ini sudah mengalami proses asimilasi dengan kelompok masyarakat lain, sehingga mereka memiliki kemampuan selain nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan. Ini berbeda dengan etnis Bajo di Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara misalnya, yang hidup homogen dan terisolir dari kelompok masyarakat lainnya.

Meskipun demikian, etnis Bajo di Kabupaten Bone tersebut tidak jauh berbeda dengan masyarakat Bajo di beberapa wilayah lainnya yaitu sama-sama miskin. Hal itu terjadi karena mitologi-kultur sebagai suku bangsa pengembara laut (Sama) atau "*Sea Gipsy*" (Bahri, 2017; Suyuti, 2006) bak menyatu dengan laut yang secara turun-temurun meyakini bahwa budaya, keyakinan, roh-roh nenek moyang semuanya di laut. Karena itu laut bukan hanya tempat untuk mencari nafkah melainkan juga sebagai upaya menghidupkan tradisi nenek moyang. Penyebab lainnya yaitu program pemerintah yang tidak merata dalam hal Kesehatan, dan rendahnya pendidikan masyarakat (formal dan nonformal) (Ananda, 2022; Anggi, 2018; Ela, *et al.*, 2019; Hakim, 2019; Mukramin, 2018; Surya & Nasution, 2018). Padahal jika mengacu pada

UUD 1945, pendidikan yang layak merupakan hak bagi setiap warga negara, sebagaimana Pasal 31 (1) sampai (5) UUD 1945. (Rizky Rinalidy, 2020). Adanya landasan konstitusi tersebut, seharusnya masalah kemiskinan dapat teratasi melalui program pendidikan yang disinergikan antara program pemerintah dan budaya lokal yang dianut oleh masyarakat Bajo.

Secara geografis, etnis Bajo telah mengalami pergeseran pola hidup dari cara hidup di laut ke cara hidup di pesisir (Hamka, 2017). Meskipun demikian kondisi sosial ekonomi mereka stagnan dan tertinggal (Mukramin, 2018, 2019). Hal itu berbeda masyarakat Bugis misalnya, yang memiliki relasi interaksi serta akses luas (Kobi & Hendra, 2020; Mukramin, 2018; Surya & Nasution, 2018), dan memiliki kemampuan untuk *survive* dalam meningkatkan kesejahteraan generasi anak cucu mereka serta memiliki akses pendidikan sampai ke perguruan tinggi dan memperoleh pekerjaan selain sebagai nelayan. Mereka memiliki kemampuan memanfaatkan sumber daya alam serta memiliki relasi terhadap pemilik modal dan pemerintah yang bisa digunakan para sawi atau masyarakat setempat untuk membangun berbagai usaha sampingan dalam meningkatkan produktivitas pendapatan dan kesejahteraan.

Selain permasalahan di atas, etnis Bajo masih memiliki beberapa kendala lain yang menyebabkan langgengnya kemiskinan yaitu: 1) belum ada kebijakan dan penerapan pembangunan di wilayah pesisir, 2) kualitas produksi di sektor perikanan belum mapan, 3) terbatasnya kegiatan komersial dan modal sehingga menyulitkan nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapannya, 4) eksploitatif yang cukup mempengaruhi kehidupan nelayan dan 5) penguasaan teknologi yang rendah. Sebagai kelompok masyarakat miskin, mereka cenderung lemah dalam kemampuan berusaha dan memiliki keterbatasan akses terhadap sarana dan prasarana, permodalan dan kegiatan sosial ekonomi lainnya sehingga tertinggal jauh dari mereka yang memiliki potensi lebih tinggi (Zaini, 2010). Adisasmita mengatakan kemiskinan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu kronis atau struktural dan sementara (Zaini, 2010). Keterkaitannya dengan problematika kesejahteraan etnis Bajo, keterbatasan akses sumber daya manusia serta ketidakmampuan dalam pemanfaatan alam dan lingkungan merupakan permasalahan utama. Oleh karena itu, melalui program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) berbasis kearifan lokal, kemiskinan dapat diatasi dengan keterlibatan dari berbagai *stakeholders*.

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah bagian dari suatu kebijakan menjalankan merdeka belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI) berdasar Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Dwanoko *et al.*, 2022; Yanuarsari *et al.*, 2021) serta Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diterbitkan Kemendikbud bahwa ada sembilan program MBKM, yaitu 1) pertukaran mahasiswa, 2) praktik kerja profesi, 3) asistensi mengajar di satuan pendidikan, 4) penelitian/riset, 5) proyek kemanusiaan, 6) kegiatan wirausaha, 7) studi/proyek independen, 8) proyek/membangun desa, dan 9) pelatihan bela negara (Sopiansyah *et al.*, 2022; Yanuarsari *et al.*, 2021). Adanya program MBKM, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran pentingnya pendidikan formal dan non formal, agar dapat memberi ruang bagi masyarakat khususnya pada generasi muda untuk tetap belajar dan tidak terkurung dengan pengetahuan konvensional yang bersifat linear (Bariyah, 2022).

Salah satu bentuk dalam MBKM ini adalah melakukan pendampingan kepada masyarakat desa untuk mewujudkan kemandirian program membangun desa secara partisipatif dalam proses pemberdayaan masyarakat desa (Yanuarsari *et al.*, 2021). Melalui program tersebut diharapkan dapat mendukung nilai kearifan lokal dan mampu mengentaskan kemiskinan serta penguatan usaha ekonomi produktif masyarakat nelayan. Program tersebut tidak hanya menitikberatkan dalam penyelesaian masalah perguruan tinggi dan mahasiswa menuju dunia kerja semata, melainkan sebagai mitra dalam upaya adaptasi kebiasaan baru menuju peningkatan dan pemberdayaan masyarakat yang tertinggal, agar dapat hidup lebih baik secara ekonomi dan pendidikan berbasis kearifan lokal (Baron & Lestari, 2022; Naing & Hadi, 2022).

Berbagai upaya strategis dilakukan pemerintah daerah untuk meminimalisasi kesenjangan kemiskinan melalui program-program penanggulangan kemiskinan yang meliputi Raskin (Program Beras Miskin), PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), dan pemberdayaan UMKM. Namun realitasnya tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahkan kesenjangan sosial kian meningkat di tengah-tengah etnis Bajo. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, terdapat sepuluh (10) daerah di Sulawesi Selatan dengan angka kemiskinan di atas

10 persen, salah satunya adalah Kabupaten Bone. Olehnya itu, peneliti menilik permasalahan tersebut dengan tajuk “Pengentasan Kemiskinan Etnis Bajo Melalui Program MBKM Berbasis Kearifan Lokal”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan etnis Bajo, meliputi aspek-aspek seperti kemiskinan, akses terhadap sumber daya kelautan dan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian membantu menilai manfaat program MBKM bagi masyarakat nelayan miskin.

Penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif dengan jenis pendekatan studi kasus (Bungin, 2005; Cresswell, 2017; Fallis, 2013; Sugiyono, 2016, 2018), guna menyelidiki serta memahami suatu peristiwa ataupun permasalahan yang sudah berlangsung ditengah etnis Bajo dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah guna memperoleh suatu penyelesaian agar kasus yang diungkap dapat terselesaikan (Bungin, 2005; Cresswell, 2017; Sugiyono, 2016). Peneliti turun dilapangan mengamati berkenaan dengan konsep, pendapat, pendirian sikap, penilaian, dan pemberian makna terhadap pengalaman situasi dari informan sebanyak 9 orang terdiri dari 6 orang etnis Bajo, 1 orang kepala desa, 1 orang Dinas Sosial dan 1 orang Dinas Kelautan dan Pemberdayaan secara *purposive* dengan ketentuan kriteria berdasarkan data primer yang diperoleh (Bungin, 2001; Cresswell, 2017; Sugiyono, 2018). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif sesuai dengan konsep yang dikemukakan Miles dan Huberman dan Spradley (Campbell *et al.*, 2011; Molognoni *et al.*, 2019). Miles dan Huberman, menyarankan agar kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus pada setiap tahapan penelitian agar lengkap atau tuntas dan data sampai jenuh. Kegiatan analisis data meliputi reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan, atau verifikasi data.

Kondisi Sosial-Ekonomi Etnis Bajo di Kabupaten Bone

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup berakibat pada keadaan kehidupan sosial yang terlihat dari kondisi fisik rumah, rendahnya pendidikan serta kurangnya kesehatan hingga terbatas pada akses relasi interaksi baik secara horinzontal maupun vertikal. Beberapa faktor dan kondisi tersebut telah membuat terpuruknya masyarakat nelayan dalam jerat kemiskinan (Imron, 2003). Hal lain yang

juga memperparah keadaan mereka adalah adanya keterbatasan teknologi kenelayanan, terjeratnya mereka dalam hutang, dan adanya keterbatasan dalam pemasaran hasil tangkapan (Imron, 2003).

Realitas pendapatan etnis Bajo di Kabupaten Bone sangat minim kisaran antara 200-500 perminggu per trip di luar pengeluaran, belum lagi pekerjaan mereka sangat bergantung pada kondisi alam. Sebagai nelayan, waktu-waktu tertentu mereka tidak dapat mencari ikan di laut karena terkait kondisi musim. Pada musim barat, nelayan dapat mencari ikan di laut karena cuaca mendukung, namun pada musim timur (paceklik), nelayan tidak bisa mengandalkan mencari nafkah dari hasil melaut. Ketidakpastian musim dan iklim ini yang menjadi kendala masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dengan mata pencaharian sebagai nelayan (Kusumaningrum, 2013).

Berdasarkan wawancara di lapangan, masyarakat etnis Bajo memilih pekerjaan nelayan, mereka secara sadar akan kehidupan yang dilakoninya dengan serba keterbatasan atas kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan dan papan. Namun kesadaran tersebut tidak membuat mereka beralih profesi sebagai nelayan, karena melaut bagi mereka merupakan warisan leluhur yang tetap harus dijaga dan dilakukan apapun kehidupan saat ini dan yang akan datang. Informan lain mengatakan, untuk menutupi kekurangan pendapatan hasil laut yang diperoleh, serta kebutuhan sandang, pangan dan papan mereka berharap penuh uluran bantuan dari pemerintah, maka ketergantungan harapan mereka sangat kuat agar senantiasa diberikan bantuan tanpa harus meninggalkan tradisi melaut. Sebagaimana hasil wawancara yang menyatakan, arahan dan masukan dari berbagai kalangan dan sektor seperti Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Dinas Sosial Permbudayaan yang berulang kali dilakukan, akan tetapi mereka tetap konsisten pada pekerjaannya dan tidak ada yang mau beralih dan berubah, mereka lebih mengandalkan prinsip hidup yaitu melaut sebagai warisan leluhur yang tidak boleh hilang. Lemahnya pengetahuan inovasi fasilitas tangkap ikan membuat etnis Bajo menghasilkan keuntungan yang tidak lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, kurangnya pengetahuan membuat mereka bertahan pada alat tradisional dan sewa kapal untuk melaut. Alasannya masyarakat memilih pekerjaan nelayan dikarenakan pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan satu-satunya yang mereka miliki dan mudah dilakukan.

Pendapatan yang diperoleh sebagai nelayan fluktuatif, terkadang ada namun tidak sedikit juga yang tidak ada. Para nelayan biasanya mendapatkan hasil sebesar 500 ribu rupiah, dan kadang mendapatkan hasil 200 ribu rupiah untuk setiap kali melaut. Mereka di laut sekitar satu minggu, kemudian balik ke daratan menjual hasil tangkapan serta bertemu dengan sanak keluarga, kemudian tinggal sekitar tiga hari, sampai dengan satu minggu dan kembali lagi melaut, hal tersebut menjadi rutinitas jika cuaca baik. Sedangkan pengeluaran operasional atau *cost* yang harus dikeluarkan selama melaut meliputi beras 10 Kg dengan harga 120 ribu, makanan ringan (cemilan/kue) sekitar 35 ribu, rokok 1 slop (10 bungkus) sekitar 230-250 ribu, minuman (kopi/teh dan gula) sekitar 50-100 ribu, solar (diesel) sekitar 50-100 liter (karena jarak sangat jauh) 325-650 ribu, belum lagi biaya perawatan jika ada salah satu unsur mesin atau alat pancing yang rusak. Hampir rata-rata pengeluaran adalah 1 juta lebih per trip. Antara pengeluaran dan hasil yang diperoleh, sangat tidak sebanding, maka dari itu tidak sedikit yang melakukan utang piutang dan terikat perjanjian hasil dengan pemilik modal (punggawa) yang disebut dengan patron-klien. Nelayan ini dikategorikan nelayan sedang yang menggunakan kendaraan perahu jalor berkapasitas 2 sampai 5 orang, menggunakan mesin diesel 3 sampai 5 liter namun kebanyakan para nelayan memodifikasi menggunakan selang mengalirkan solar dari jeriken ke mesin.

Kemiskinan berakibat pada keadaan kehidupan sosial yang terlihat dari kondisi fisik rumah, tempat tinggal etnis Bajo dapat dikatakan sangat sederhana dan jauh dari kemewahan, mereka tinggal sepanjang garis pantai (daratan laut yang di timbun) sehingga rumah yang mereka miliki adalah berbentuk panggung berlantai papan yang di susun berdasarkan bentuk rumah, di bawahnya air laut yang pasang surut. Rumah-rumah penduduknya terbuat dari kayu, berbentuk panggung, dengan tiang-tiang tinggi yang tertanam ke dalam air laut.

Sebagian etnis Bajo di Bajoe membangun tempat tinggal di lahan milik warga asing keturunan Cina. Para nelayan membangun rumah di atas tanah dengan status bukan kepemilikan aset, hal ini menunjukkan bahwa para nelayan tersebut jauh dari kesejahteraan, hunian tempat tinggal para etnis Bajo hanya sebatas mendompleng untuk sementara waktu tanpa ada ketentuan hak penggunaan yang kapan saja pemilik tanah ingin menggunakan maka para nelayan harus siap dan rela untuk meninggalkan lokasi yang dihuni tersebut. Pada kondisi tersebut, beberapa masyarakat yang tinggal di tempat milik

orang Cina mulai resah, karena tempat yang mereka diami akan tergusur, sedangkan para nelayan yang tinggal area tersebut belum memiliki modal untuk membeli tanah untuk membangun tempat tinggal.

Relasi Swadaya nonPatron-Klien

Masyarakat nelayan sulit terlepas dari ikatan sistem patron-klien karena memiliki keterbatasan kemampuan modal dan usaha. Maka terjadilah relasi sistem kerja sama dan bagi hasil, dimana saling menguntungkan antara pemilik modal dan pengguna modal berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama walaupun tidak secara tertulis. Etnis Bajo selain melakukan relasi dengan sistem patron-klien, mereka juga memanfaatkan swadaya non patron-klien, yaitu meminjam uang dengan nilai nominal tertentu dan akad nominal pengembalian tertentu pula. Hal tersebut dilakukan sebagai strategi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, biaya perlengkapan dan operasional melaut. Fenomena penghasilan yang tidak menentu sedangkan iuran tagihan harus dilunasi menjadi hidup dalam serba ketidakpastian dan jauh dari kesejahteraan. Walaupun demikian, mereka tetap harus melakukannya untuk keberlangsungan hidup dan kehidupan mereka.

Keterikatan hutang bukan hanya kepada patron saja, namun juga kepada bank dan lembaga keuangan formal seperti Permodalan Nasional Madani (PNM) anak usaha BRI yang berbisnis di bidang pembiayaan mikro bersifat jangka pendek maupun jangka panjang sebagai modal untuk membeli perlengkapan alat pancing serta bahan bakar minyak (BBM). Pinjaman yang diberikan senilai 5 juta rupiah, yang harus dikembalikan dengan cara mencicil selama 6 bulan. Pembayaran cicilan dilakukan pada hari Selasa pada setiap minggunya dengan besaran 225 ribu rupiah. Adapun yang memperoleh pinjaman senilai 2 juta rupiah, yang harus dikembalikan adalah 90 ribu rupiah.

Etnis Bajo di Bone merupakan masyarakat nelayan yang hidup di bawah garis kemiskinan serta pendidikan rendah menjadi penyebab utama terjadinya disparitas sosial yang telah terjadi secara turun temurun (Novianti, 2017; Rustan *et al.*, 2018). terlihat pada aspek pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang sulit terpenuhi, memperoleh hasil tangkapan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan makan semata, hal ini juga sebagai akibat dari homogenitas mata pencaharian dan sulitnya memperoleh akses dan peluang kerja lain, karena berbagai tantangan yang dihadapi. Adanya kemiskinan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang diakibatkan oleh sikap

dan kebiasaan seseorang atau masyarakat, biasanya bersumber dari budaya atau kebiasaan yang relatif tidak mau meningkatkan taraf hidupnya melalui cara-cara modern (Kusumaningrum, 2013). Salah satu tradisi leluhur yang dilesatrikan oleh etnis Bajo kepada generasi mereka ialah menanamkan kepercayaan dan perilaku melaut, bahwa melaut bagian tak terpisahkan dengan semboyan “dari laut serta buat laut”. Siklus kehidupan etnis Bajo mulai dari kelahiran, pekerjaan, perkawinan, pengobatan, hingga kematian senantiasa dihubungkan dengan laut. Hal tersebut menyebabkan orang Bajo membuat satu sistem keyakinan mereka sendiri yang berpusat dari laut dan untuk laut. Belum lagi dengan rendahnya pendidikan dan keterampilan selain melaut membuat etnis Bajo merasa *insecure* jika harus bekerja selain nelayan, berdasarkan informan bahwa kemampuan mereka hanya melaut, karena itu yang diajarkan oleh orangtua mereka sejak dari kecil kemudian kami tidak bisa bertani atau berkebun karena pekerjaan itu sulit dilakukan dibandingkan melaut. Bagian dari Kebiasaan seperti itu bisa jadi malas, boros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif dan juga relatif bergantung pada pihak lain. Hal ini menjadikan etnis Bajo tertinggal dalam kemiskinan dibandingkan masyarakat lainnya yang ada disekitarnya (Ferizaldi, 2022).

Langgengnya disparitas, tidak terlepas adanya perbedaan dan ketimpangan pada kehidupan masyarakat yang terjadi, baik melalui sektor pembangunan ekonomi kemasyarakatan, pendidikan, sosial, politik budaya dan agama, dan lebih berkonotasi negatif terkait dengan kehidupan sosial antara harapan masyarakat dan realitas yang terjadi, akibat dari struktural, kultural dan geografis (Nur, 2004). Analisis disparitas sosial atas kemiskinan yang terjadi pada etnis Bajo disebabkan oleh dua faktor yakni, faktor dalam (*intern*) dari ketidaksiapan sumber daya manusia dalam menerima perubahan sosial, dan faktor luar (*ekstern*) dari pemerintah terhadap lemahnya analisis kebutuhan masyarakat etnis Bajo yang kemudian berdampak pada tidak tepatnya berbagai program pemerintah dalam menyelesaikan berbagai masalah sehingga munculnya disparitas sosial atas kemiskinan masyarakat etnis Bajo tersebut (Surya & Nasution, 2018).

Berdasarkan realitas kehidupan etnis Bajo di Bone, kunci dari semua permasalahan di atas adalah pengembangan sosialisasi dan pengoperasian fasilitas bagi masyarakat etnis Bajo. Hal ini meliputi pemilihan metode dan perangkat serta penguatan fungsi berbagai lembaga yang dapat melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat,

meliputi berbagai kegiatan seperti pelestarian dan pengembangan usaha pariwisata berbasis masyarakat lokal, pembentukan forum masyarakat pesisir secara terintegrasi dan berkesinambungan bekerjasama dengan pemangku kepentingan sehingga kesejahteraan masyarakat setempat dapat meningkat.

Pengentasan Kemiskinan Etnis Bajo

Uraian analogis rasional dari Jim & Tesoriero (2008) tentang gagasan pemberdayaan adalah sentral bagi suatu strategi keadilan sosial dan hak asasi manusia (HAM). Ada dua konsep penting yaitu keberdayaan dan yang dirugikan (Jim & Tesoriero, 2008). Wacana kebijakan pembangunan masyarakat, istilah pemberdayaan selalu dikaitkan dengan istilah kemandirian, partisipasi, jejaring dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan didasarkan pada kekuatan individu dan tingkat masyarakat. Pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal dengan adanya partisipasi masyarakat itu sendiri sehingga dapat terberdaya masyarakat lokal sebagai bagian penting dalam menciptakan kemandirian dan proses pemberdayaan (Cahyaningrum, 2018). Adanya persebaran pembangunan dan pemberdayaan yang terjadi pada setiap wilayah untuk setiap permasalahannya, kebanyakan berawal dari ketidakmampuan internal masyarakat itu sendiri, baik secara sumber daya manusia maupun sumber daya alam (Umar & Syarif, 2019).

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Masyarakat Bajoe, pemerintah daerah telah melakukan pemberdayaan dan pemerataan pembangunan. Akan tetapi, dalam proses pelaksanaan program, kurang solutif dari permasalahan yang ada, bahkan cenderung melahirkan kesenjangan baru (Topan & Wahyu, 2017). Pemberdayaan yang dilakukan pada masyarakat walaupun menggunakan konsep partisipasi, mandiri, menggunakan kekuatan individu maupun sosial, akan mengalami gejala proses kekuasaan jika hal itu diperlukan oleh penguasa terhadap yang dikuasai sebagai penentu kebijakan-kebijakan strategis (Bagus, 2014). Perspektif Politik dan kekuasaan untuk memahami hakikat kekuasaan dalam masyarakat modern terbagi dalam empat kategori, yaitu perspektif pluralis, perspektif elit, perspektif struktural, dan perspektif post-struktural (Jim & Tesoriero, 2008).

Membangun desa adalah partisipasi dalam proses pemberdayaan masyarakat desa baik secara sarana prasarana maupun sektor usaha rumah tangga (Novianti, 2017). Pemberdayaan dalam konteks membangun desa adalah proses memfasilitasi

warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi berbagai masalah dan potensi yang terdapat di desa. Diharapkan membantu mengembangkan desa mandiri kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dalam meningkatkan SDM (Yanuarsari et al., 2021), meningkatkan kesadaran literasi dan numerasi serta pemasaran produk masyarakat melalui media digitalisasi sebagai pemegang peran penting dalam mengembangkan perekonomian desa termasuk pengembangan desa wisata. Adaptasi lingkungan merupakan suatu kemampuan dari masyarakat untuk bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, dengan suatu tujuan untuk bertahan hidup. Adaptasi ini bisa dilakukan dengan pengembangan dan penataan ulang potensi daerah di sektor usaha mikro, kecil dan menengah.

Etnis Bajo merupakan komunitas nelayan yang tinggal di wilayah Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia, dan kerap menghadapi permasalahan kemiskinan yang kompleks. Untuk mengatasi kemiskinan di kalangan mereka, pemerintah telah melaksanakan banyak program dan inisiatif. Pemerintah telah meluncurkan beberapa program untuk memerangi kemiskinan pada etnis Bajo. Pemerintah telah memberikan bantuan kepada mereka dalam bentuk beras, uang atau kebutuhan pokok lainnya untuk membantu mereka memenuhi kebutuhannya seperti pangan dan sandang. Terdapat program pendidikan khusus untuk memastikan anak-anak etnis Bajo mempunyai kesempatan pendidikan yang baik yang meliputi beasiswa, pembangunan sekolah dan kesempatan transportasi yang baik untuk kolektif. Selain itu, pemerintah juga menyelenggarakan program pelatihan vokasi di bidang pengelolaan sumber daya air yang mencakup teknik pengelolaan ikan seperti pemotongan, pengeringan, pengasapan, atau konservasi yang dapat meningkatkan manfaat ekonomi pembelian. Namun program pemerintah belum mampu mengatasi kemiskinan suku Bajo secara tuntas. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan program-program yang berkelanjutan, tepat sasaran, terpadu dan berjangka panjang. Hal ini didasari pemahaman bahwa kemiskinan yang dialami etnis Bajo menunjukkan aspek yang kompleks dan beragam serta berdampak pada hambatan wilayah, sosial, dan budaya yang harus diperhatikan. Selain itu, program pemerintah yang ada saat ini masih mempunyai kendala dalam mencapai tujuannya, karena akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kapasitas pada etnis Bajo masih sangat terbatas.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka membangun desa merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk terjun ke masyarakat dan menjadi agent of change (agen pembaharuan) dengan melibatkan para ahli, peneliti, dan akademisi untuk berperan serta dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sebagai upaya dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan yang bekerja sama Kementerian Desa PDTT serta Kementerian atau *stakeholder* lainnya. Secara ekologis penerapan pendidikan berbasis *local wisdom* yang dapat diterapkan pada etnis Bajo di Kabupaten Bone adalah pendidikan berbasis lingkungan yang akan terintegrasi dengan nilai-nilai karakter yang menjadi ciri khasnya, yang dapat tepat guna untuk penerapan kebijakan MBKM serta terkait kemajuan teknologi digital dengan segala tuntutan sumber daya manusia yang berkualitas, hal ini pula dapat dikolaborasi dengan perguruan tinggi yang siap secara sumber daya manusia baik ditingkat dosen maupun mahasiswa serta sejalan dengan pencahangan program MBKM oleh Kemendikbud tahun 2020 (Baron & Lestari, 2022; Hermanto et al., 2021). Maka dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik dalam aspek teknis maupun non teknis yang berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi program MBKM tersebut (Hermanto et al., 2021), pembelajaran tidak lagi dititikberatkan pada formal melainkan juga nonformal kemudian tidak hanya berfokus pada dalam kelas akan tetapi juga diluar kelas (lingkungan) sebagaimana program modul nusantara yang berjalan saat ini. Dapat berkontribusi sosial bagi para generasi etnis Bajo, mengurangi angka putus sekolah, melatih keterampilan, kreatif, menimbulkan kesadaran arti pentingnya pendidikan dalam memanfaatkan lingkungan sekitar, mendaur ulang sampah, penghijauan, penanaman terumbu karang dan peternakan dan lain sebagainya.

Pendidikan Berbasis *Local Wisdom*

Era globalisasi saat ini pendidikan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi manusia karena melalui pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidupnya (Gularso & Lukitoaji, 2017). Peningkatan kualitas hidup seseorang mampu merubah perekonomian suatu masyarakat dan berdampak pada peradaban suatu bangsa (Gularso & Lukitoaji, 2017). Pendidikan berbasis *local wisdom* atau pendidikan multikultural (Amirin, 2013; Maemunah et al., 2021) merupakan proses pembelajaran yang berbasis kearifan lokal yang bersesuaian dengan nilai-nilai norma, adat, budaya, serta tradisi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat sekitar serta diakui kebenarannya. Pembelajaran yang

berbasis kearifan lokal berorientasi pada pendidikan karakter (Mislikhah, 2020; Ulfah Fajarini, 2014). Pendidikan *berbasis local wisdom* meliputi kesadaran orang tua terhadap pendidikan, keberpihakan kebijakan pemerintah, dan pemanfaatan lingkungan untuk Pendidikan (Maemunah et al., 2021) pendidikan tersebut sebagai modal sosial dalam meningkatkan produktifitas berpikir, kreatif, inovatif dan adaptif dalam membangun relasi, kerja sama dan kemitraan untuk kesejahteraan sehingga pendidikan berbasis *local wisdom* dapat diintegrasikan dengan program MBKM membangun desa dengan tetap menanamkan karakter nilai-nilai warisan leluhur ditengah-tengah perkembangan era globalisasi.

Pendidikan merupakan modal sosial masyarakat dalam peningkatan produktifitas berpikir, kreatif, inovatif dan adaptif dalam membangun relasi, strukturasi dan kerja sama sebagai bagian terpenting dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat, khususnya pada masyarakat pesisir, marginal atau nelayan yang memiliki serba keterbatasan (Nababan & Situmeang, 2022). Adanya upaya pendidikan berbasis *local wisdom* bagian dari modal sosial dalam mengkonstruksi dan memaknai kembali kekayaan budaya yang dimiliki sebagai potensi dan sumber penghasilan dalam meningkatkan kesejahteraan. Dirjendikti (2021) bahwa pembangunan perdesaan harus mengutamakan kearifan lokal di perdesaan, antara lain struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik geografis, pola usaha pertanian, keterkaitan ekonomi desa dan kota, serta sektor kelembagaan desa (Zamzami, 2016).

Pemanfaatan potensi daerah sendiri sebagai basis pemberdayaan merupakan sistem kontekstual partisipatif dan menjadikan masyarakat setempat memiliki peran penting dalam meningkatkan usaha dan kesejahteraan secara mandiri yang sesuai karakter masyarakat sebagai bagian dari lingkungan sosialnya. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pemberdayaan menekankan pentingnya suatu proses edukatif atau pembelajaran dalam melengkapi masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan mereka sehingga masyarakat memiliki gagasan-gagasan, pemahaman, kosakata, dan keterampilan bekerja menuju perubahan yang efektif dan berkelanjutan (Gunamantha, 2015). Kemudian tidak terlepas atas peran dari jaringan komunikasi dan interaksi terkait dengan inovasi dan difusi (Ariestya, 2019). Lingkungan Sosial menurut Stroz dalam (Sudarsana, 2020) meliputi "semua kondisi-kondisi dalam dunia yang dalam cara-cara

tertentu mempengaruhi tingkah laku seseorang, termasuk pertumbuhan dan perkembangan atau *life processe*, yang dapat pula dipandang sebagai penyiapan lingkungan *to provide environment* bagi generasi yang lain". Maka dari itu, proses pemberdayaan berbasis kearifan lokal merupakan kegiatan yang benar-benar memberikan ruang dan kesempatan sebesar-besarnya pada setiap masyarakat untuk berkembang berdasarkan potensi lingkungan sosial dan mata pencaharian yang mampu mengentaskan kesenjangan sosial khususnya pada masyarakat perdesaan yang memiliki mata pencaharian homogen sebagaimana kondisi masyarakat etnis Bajo yang ada di Bone (Rahmi et al., 2022).

Program MBKM Membangun Desa dalam Pengentasan Kemiskinan

Kajian tentang pendidikan masyarakat dan kemiskinan, khususnya pada etnis Bajo merupakan hal unik dan penting untuk dilakukan sebagai simbol eksistensi warga pesisir dari berbagai latar belakang dan fenomena berbeda dibandingkan dengan masyarakat lainnya yang bermukim baik darat maupun di wilayah pesisir (Naing & Hadi, 2022). Ketertinggalan yang terjadi pada etnis Bajo adalah bagian yang tak terelakkan oleh mitologi yang secara turun temurun serta homogenitas pada mata pencaharian, hal tersebut berdampak sistemik pada sistem sosial secara vertikal dan horizontal serta menimbulkan kemiskinan kemasyarakatan berkepanjangan, diantara kemiskinan tersebut yaitu kemiskinan, pendidikan rendah, dan inklusifitas kultur etnis Bajo yang mengalami marginalisasi hingga saat ini (Nababan & Situmeang, 2022).

Fenomena hubungan interaksi yang terjadi pada kelompok masyarakat merupakan manifestasi dari eksistensi keberadaan dan perbedaan yang terdapat pada masyarakat sebagai makhluk sosial yang senantiasa memiliki kecenderungan untuk bergaul sesama manusia dan melakukan hubungan sosial yang bersifat intim antar individu maupun kelompok demi mencapai tujuan tertentu (Amalia & Purwaningsih, 2017). Adanya hubungan proses asosiatif, bentuk interaksi yang terjalin akan membawa pada arah hubungan kerja sama, yang menghasilkan sebuah akomodasi dalam menjalankan aktivitas rutin (Handoko, 2013). Dengan demikian, komunitas sosial muncul dari komunitas kehidupan sosial dan kerja sosial serta intensitas interaksi dalam masyarakat dan lingkungan. Selain sebagai komunitas sosial, masyarakat etnis Bajo di Kabupaten Bone juga berlandaskan mitologi budaya yang diwariskan (Baron & Lestari, 2022).

Pogram MBKM membangun desa adalah partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan desa melalui kemitraan dan kerjasama antara perguruan tinggi, kerjasama desa atau Kuliah Kerja Nyata (KKNT) Tematik (Rodiyah, 2021; Yuherman et al., 2021). Kegiatan membangun desa yang dilakukan dalam upaya untuk membantu masyarakat desa dalam membangun infrastruktur maupun memberi dukungan untuk pembangunan desa (Hermanto et al., 2021), dalam pelaksanaannya, kegiatan proyek di desa meningkatkan efisiensi perencanaan, pelaksanaan dan hasil pembangunan desa karena dalam prosesnya turut melibatkan para ahli, peneliti, dan akademisi (Yanuarsari et al., 2021). Sedangkan tujuan pelaksanaan membangun desa dan KKNT adalah 1) kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan dapat mendampingi perencanaan program di desa, mulai dari kajian potensi, masalah dan tantangan pembangunan, penyusunan prioritas pembangunan, perancangan program, desain sarana prasarana, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), supervisi pembangunan, hingga monitoring dan evaluasi, 2) meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah sumberdaya lokal yang menjadi unggulan desa tersebut, 3) memberikan pengalaman dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai generasi handal, 4) Memdampingi masyarakat dalam implementasi pembangunan SDGs desa menuju desa berkembang dan mandiri, 5) Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT dan 6) Pengembangan ilmu dan pengetahuan teknologi bagi mahasiswa dan masyarakat.

Maka dengan adanya pengentasan kemiskinan pada etnis Bajo melalui program MBKM membangun desa yang berbasis kearifan lokal (Rahayu, 2022) sebagai wujud kegiatan kemasyarakatan baik secara strukutral, kultural dan natural, berdasarkan beberapa penelitian yang telah ditunjukkan di wilayah lainnya dengan keterlibatan berbagai pihak yang memiliki empati dan visi pembangunan desa, bersinergi peran satu dengan lainnya. Kemitraan antara kelompok pemangku kepentingan desa dengan pihak pemerintah yang lebih atas, Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), LSM, kelompok swasta dan kelompok cendekia dari Perguruan Tinggi (mahasiswa dan dosen yang melaksanakan MBKM untuk Pembangunan Desa) (Kunusa et al., 2022; R & Nusanto, 2022; Yanuarsari et al., 2021), dengan harapan melalui program MBKM dapat mengentaskan kemsikinan pada masyarakat nelayan agar terwujud desa mandiri

dan berdikari berdasarkan potensi dan kearifan lokal yang dimiliki.

Pemerintah juga diharapkan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan dalam masyarakat (Nurkholiq, 2022). Mampu merumuskan model serta strategi, secara konseptual dan praktis dalam pengentasan kemiskinan nelayan, selanjutnya ada pembinaan produktifitas kerja serta keterampilan usaha selain sebagai nelayan, b) khususnya dalam peningkatan kesejahteraan, dilakukan pemberdayaan etnis Bajo, c) keterbukaan terhadap inovasi alat penangkapan, d) ekspansi dan strategi pemasaran hasil tangkapan nelayan. Kemudian dapat dijadikan sebagai masukan bagi yang berkepentingan dalam membuat kebijakan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan nelayan khususnya kemiskinan etnis Bajo (Nurkholiq, 2022).

Implementasi Program MBKM berbasis Kearifan Lokal

Program MBKM berbasis kearifan lokal merupakan pendekatan yang memanfaatkan pengetahuan dan budaya lokal dalam merancang dan menjalankan program pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Pendekatan ini mengakui pentingnya kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan. Memanfaatkan Pengetahuan Lokal yang telah ada dalam komunitas nelayan dan masyarakat pesisir. Hal ini melibatkan memahami cara tradisional dalam menangkap ikan, mengelola sumber daya laut, serta praktik-praktik yang telah teruji dari generasi ke generasi. Program MBKM berbasis kearifan lokal akan memperhatikan budaya dan nilai-nilai lokal yang terkait dengan laut dan perikanan. Ini membantu menjaga keberlanjutan lingkungan serta mempromosikan identitas budaya komunitas. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program adalah elemen kunci. Masyarakat setempat harus memiliki peran aktif dalam mengambil keputusan dan merancang program MBKM berdasarkan kebutuhan serta aspirasi mereka.

Ada beberapa model strategis yang dapat digunakan dalam upaya pengentasan kemiskinan etnis Bajo melalui implementasi program MBKM berbasis kearifan lokal di Kabupaten Bone diantaranya:

1. Mewujudkan kolaborasi melalui kemitraan dan kerjasama antara perguruan tinggi, kerjasama antara desa yang melibatkan para ahli, peneliti, dan akademisi dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat etnis Bajo melalui program MBKM membangun desa (pendidikan

formal dan atau nonformal) berbasis lingkungan serta meningkatkan produktifitas berpikir, kreatif, inovatif dan adaptif.

2. Upaya pembentukan lembaga swadaya masyarakat cinta kepada alam sebagai wadah yang akan berperan dalam peningkatan dan pemberdayaan masyarakat serta dapat menumbuhkan kemandirian untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
3. Upaya melibatkan masyarakat dalam pelaksana kelembagaan yang ada (baik formal maupun informal), pelaksana kegiatan tersebut adalah pemrakarsa yang menginisiasi/mengkoordinir hasil perencanaan desa sehingga dapat meningkatkan kesadaran publik melalui saran dan diskusi rutin. Karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan potensi dan kelebihannya, diharapkan dapat mendorong desa dan sekitarnya dan bertindak bijak.
4. Menumbuhkan kelompok-kelompok berbasis (organisasi rakyat) atau kelompok swadaya Masyarakat (KSM). KSM adalah bagian integral dari organisasi sosial yang kegiatannya bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mempunyai peranan sebagai instrumen proses perubahan sosial, yaitu sebagai mesin perubahan paradigma, membiasakan diri mempraktikkan nilai-nilai baru, cara pandang baru dan pelembagaannya dalam kehidupan sehari-hari.
5. Usaha berbasis rumah tangga, dengan usaha tersebut menunjukkan bahwa ada karakteristik jenis usaha berbasis rumah tangga nelayan di permukiman etnis Bajo, berbahan baku hasil laut seperti, pengeringan teripang, pengeringan ikan dan udang, serta rumah makan yang bahan bakunya berasal dari dalam kawasan permukiman. Terdapat pula usaha berbahan baku bukan hasil laut seperti penjualan sembako, pembuatan kue dan minuman, serta jasa seperti salon yang bahan bakunya berasal dari luar kawasan permukiman.
6. Adanya ketersediaan sarana ruang produksi pengolahan hasil laut yang bersifat mikro, pemasarannya hanya dijual ke pelanggan tetap atau pengepul yang akan menjual ke daerah lain, sebagai salah satu strategi menjadikan kawasan permukiman etnis Bajo sebagai Kawasan pusat pengolahan hasil laut agar lebih dikenal oleh masyarakat kemudian
7. Konservasi kawasan permukiman etnis Bajo menjadi eko wisata lokal atau nasional serta menata tempat pengolahan hasil laut agar menjadi pusat penjualan oleh-oleh khas etnis Bajo.
8. Menumbuhkan infrastruktur sosial. Sarana infrastruktur merupakan penunjang terpenting

bagi berfungsinya sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat akses pemerintah dan swasta dalam menentukan kebijakan pembangunan wilayah pesisir, serta memperkuat akses ekonomi politik kelembagaan dan jaringan sosial masyarakat, bermitra dengan berbagai pihak dan menerapkan tata Kelola yang baik pada pemerintahan.

Maka melalui upaya pengentasan kemiskinan etnis Bajo melalui implementasi MBKM berbasis kearifan lokal dalam menunjang kegiatan kemasyarakatan baik secara wilayah maupun budaya lokal, diharap mampu meminimalisir disparitas tersebut. Pada pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan masalah disparitas dalam masyarakat dengan merumuskan model serta strategi, baik secara konseptual maupun praktis terkait pengentasan disparitas sosial nelayan, kemudian ada pembinaan produktifitas kerja serta keterampilan usaha selain sebagai nelayan, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan, dilakukan pemberdayaan etnis Bajo, kemudian keterbukaan terhadap inovasi alat penangkapan, dan ekspansi dan strategi pemasaran hasil tangkapan nelayan.

Pendekatan ini memungkinkan program MBKM untuk lebih mudah diadaptasi ke kondisi lokal yang berbeda. Ini penting karena setiap daerah memiliki tantangan dan potensi yang berbeda dalam sektor kelautan dan perikanan. Program MBKM berbasis kearifan lokal bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat, terutama nelayan dan petani ikan, untuk menjadi agen perubahan dalam pengelolaan sumber daya laut dan peningkatan ekonomi mereka sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan, peralatan, atau sumber daya lainnya yang memungkinkan masyarakat untuk lebih mandiri. Dalam beberapa kasus, program MBKM berbasis kearifan lokal dapat melibatkan pihak eksternal, seperti pemerintah, LSM, dan organisasi internasional. Namun, kemitraan ini harus dilakukan dengan menghormati kearifan lokal dan melibatkan komunitas setempat dalam proses pengambilan keputusan.

Penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap program MBKM berbasis kearifan lokal. Ini memungkinkan untuk memperbaiki dan mengukur dampak program terhadap masyarakat dan lingkungan. Program MBKM berbasis kearifan lokal bertujuan untuk menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan

dan berdampak positif bagi masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir. Dengan memanfaatkan pengetahuan lokal dan melibatkan komunitas setempat secara aktif, program ini dapat menjadi lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan melindungi sumber daya laut yang penting.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Laut merupakan sumber utama dalam kehidupan masyarakat etnis Bajo di Kabupaten Bone. Disisi lain, masyarakat nelayan memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan lingkungan, serta ketidakmampuan dalam mengelola sumber daya alam laut dengan baik, walaupun telah lama bekerja sebagai nelayan dari generasi kegenerasi tetap sulit keluar dari kerangkeng kesmiskinan.

Adanya implementasi program MBKM berbasis kearifan lokal sebagai upaya pengentasan kemiskinan etnis Bajo, diperoleh model konseptual dan praktis sebagai berikut: 1) mampu membentuk proyeksi koperasi penjualan/pemasaran hasil tangkapan nelayan dan menghasilkan usaha rumah tangga (mikro); 2) meningkatkan *skill* melalui pendampingan penuh secara berkala/perperiodik sampai mandiri; 3) pembentukan wadah/organiasi peningkatan dan pengembangan kualitas etnis Bajo; 4) pengadaan lokasi sebagai ekowisata; 5) pengadaan rumah baca berbasis lingkungan yang terintegrasi dengan pendidikan formal dan kerja sama melalui kemitraan antar perguruan tinggi dan antar desa serta perpustakaan daerah; 6) mobilisasi tenaga pengajar dan pelajar intern dan ekstern di dalam dan di luar etnis Bajo berbasis kemitraan melalui program MBKM membangun desa.

Diharapkan kepada pemerintah daerah mampu menganalisis dan mengembangkan segala potensi etnis Bajo di Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone Sulawesi Selatan kaitannya dengan mitra dan kerja sama dengan perguruan tinggi bersama dengan Kementerian Desa PDTT melakukan pemberdayaan melalui pogram MBKM membangun desa. Pendidikan berbasis *local wisdom* mampu meningkatkan kualitas hidup etnis Bajo serta mampu merubah perekonomian yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dengan tetap melestarikan nilai-nilai norma, adat dan budaya warisan leluhur etnis Bajo.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah *ta'ala*, selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada rektor, Lembaga LP3M, dan para dosen pendidikan sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar yang

telah banyak berkontribusi sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian ini hingga dipublikasikan di jurnal bereputasi nasional.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Semua author ikut serta berkontribusi sesuai perannya masing-masing, penelitian ini merupakan kolaborasi antara dosen dan mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, N. (2022). Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Berbasis Kkni (Model MBKM Program Studi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam). *Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 2(1), 24–37.
- Amalia, U. T., & Purwaningsih, E. (2017). *Local Wisdom Tourism Development Of Semarang With Tourism Cluster System As An Action For Sustainable Economics Development*. 871–879.
- Amirin, T. M. (2013). implementasi Pendekatan Pendidikan Multikultural Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 1(1). <https://doi.org/10.21831/jppfa.v1i1.1047>
- Ananda, F. (2022). Aksesibilitas Layanan Kesehatan Pada Masyarakat Suku Bajo. In *Skripsi* (pp. 12–15). Universtas Hasanuddin. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17109/>
- Anggi Rantau P. (2018). Faktor Utama Penyebab Kemiskinan Masyarakat Nelayan di Sulawesi. *Academia.Edu*, 1(1), 1.
- Ariestya, A. (2019). *Peran Jaringan Komunikasi dalam Gerakan Sosial untuk Pelestarian Lingkungan Hidup*. 04(01), 35–45.
- Bahri, S. (2017). Modal Sosial Orang Bajo Di Bajoe Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. *Walasuji : Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 8(1), 153–164. <https://doi.org/10.36869/wjsb.v8i1.112>
- Baron, R., & Lestari, V. L. (2022). Local Wisdom Value in Implementing of Merdeka Belajar Kampus Merdeka in Digital Era. *Jurnal Pendidikan*, 14(4), 7175–7184. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i4.2169>
- Bungin, B. (2001). Metode Penelitian Kualitatif , Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. In *PT RajaGrafindo Persada*.
- Bungin, B. (2005). Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua. In *Kencana*.
- Cahyaningrum, D. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Pada K Omunitas Suku Bajo Di Wakatobi*. <http://repository.unair.ac.id/71147/>
- Campbell, A., McNamara, O., & Gilroy, P. (2011). Qualitative Data Analysis. *Practitioner Research and Professional Development in Education*, 125–145. <https://doi.org/10.4135/9780857024510.d49>
- Cresswell, J. W. (2017). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi ketiga. In *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Dhiniaty Gularso, Beny Dwi Lukitoaji, F. N. (2017). Efektifitas Penggunaan Model Pembelajaran Pendidikan Kebudayaan Daerah Berbasis Local Genius, Local Wisdom, dan Riset Ditinjau dari Keterampilan Berpikir Kritis Calon Guru Sekolah Dasar. *Jurnal Bidang Pendidikan Dasar(JBPD)*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jbpd.v1i1.1600>
- Dulkhan, M., & Nurjanah. (2018). Pengaruh kemiskinan terhadap tingkat tindak kriminalitas di kota bandung. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(1), 36–57. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/2770>
- Dwanoko, Y. S., Kusufa, A. B. R., Firdaus, & Riril Mardiana Sain. (2022). Implementasi MBKM Dalam Bentuk Pelatihan E-Commerce Untuk Mewujudkan Digital Ekonomi Masyarakat. *Jurnal ABM-Mengabdi*, 9(1), 60–69. <http://journal.stie-mce.ac.id/index.php/jam/article/view/1041/397>
- Ela, O., W. O., Bahtiar, & Upe, A. (2019). Strategi Adaptasi Masyarakat Nelayan Dalam Menghadapi Kemiskinan di Desa Mekar Sama Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna. *Neo Societal*, 4(1), 584–590.
- Fallis, A. . (2013). John Cresswell - Research Design. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Ferizaldi. (2022). Urgensi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Sosiologi*, 16(2), 158–169.
- Gunamantha, I. M & Susila, G. P. A. J. (2015). Analisis Dampak Program Pengembangan Kecamatan terhadap Pengetasan Kemiskinan di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 523–533.
- Hakim, M. (2019). Fatalisme dan Kemiskinan Komunitas Nelayan. *Society*, 7(2), 163–173. <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/society.v7i2.118>
- Hamka. (2017). Tipomorfologi Kawasan Permukiman Nelayan Pesisir. *Jurnal Spectra*, XV(29), 41–52.
- Handoko, W. (2013). Strategi pengembangan masyarakat (Community Development) melalui Program Pengembangan Koperasi dan UMKM Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 1(2), 245–259.
- Hermanto, A., Kusnanto, G., & Fadilah, N. (2021). Pengembangan Model Sistem Informasi Dalam Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Untuk Mendukung Program MBKM. *Proceeding KONIK (Konferensi Nasional Ilmu Komputer)*, 5(1), 20–27. <https://prosiding.konik.id/index.php/konik/article/view/9>
- <https://sulsel.bps.go.id/>, 4 BPS Sulsel 88 (2022). <https://sulsel.bps.go.id/>
- Ida Bagus. (2014). Model Pemberdayan Masyarakat Miskin dengan The Sustainable Livelihood

- Approach Berbasis Budaya Lokal di Daerah Lahan Kering Nusa Penida Klungkung-Bali. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 371–379.
- Imron, M. (2003). Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 5(1), 63–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmb.v5i1.259>
- Jim, I., & Tesoriero, F. (2008). Community Development. In *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*. Pustaka Pelajar.
- Kobi, W., & Hendra, H. (2020). Kajian Geografi Ekonomi: Studi Kasus Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Suku Bajo di Popayato, Gorontalo. *Jambura Geo Education Journal*, 1(1), 16–25. <https://doi.org/10.34312/jgej.v1i1.4637>
- Kunusa, W. R., Sihaloho, M., & Aman, L. O. (2022). Pengembangan Potensi UMK Desa Dutohe Barat Berbasis Bahan Lokal Pemanfaatan Daun Kelor (*Moringa oleifera*) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. 1(2), 81–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.34312/damhil.v1i2.17751>
- Kusumaningrum, A. (2013). Kebijakan Pembangunan dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Purworejo , Jawa Tengah). *Agriekonomika*, 2(1), 13–26.
- Lumenta, C. Y., Kekenusa, J. S., Hatidja, D., Jalur, A., & Eksogen, V. (2009). Analisis Jalur Faktor-Faktor Penyebab Kriminalitas di Kota Manado. *Jurnal Ilmiah Sains*, 12(2), 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JIS/article/view/556>
- Maemunah, M., Haniyah, S., & Mukramin, S. (2021). Education Marginalization Of Bajo Children Based On Local Wisdom. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 2(3), 585–591. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v2i3.80>
- Mardinsyah, A. A., & Sukartini, N. M. (2020). Ketimpangan Ekonomi, Kemiskinan dan Akses Informasi : Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Kriminalitas ? *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 5(1), 19. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v5i1.554>
- Mislikhah, S. (2020). Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal. *FALASIFA : Jurnal Studi Keislaman*, 11(2), 17–34. <https://doi.org/10.36835/falasifa.v11i2.368>
- Molognoni, L., Daguier, H., dos Santos, I. R., & De Dea Lindner, J. (2019). Influence of method validation parameters in the measurement uncertainty estimation by experimental approaches in food preservatives analysis. *Food Chemistry*, 282(2019), 147–152. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.12.115>
- Mukramin, S. (2018). Strategi Bertahan Hidup: Masyarakat Pesisir Suku Bajo di Kabupaten Kolaka Utara. *Walasuji: Balai Pelestarian Nilai Dan Budaya (BPNB) Makassar, Sulawesi Selatan*, 9(1), 175–186. <https://doi.org/10.36869/wjsb.v9i1.29>
- Mukramin, S. (2019). *Homogenitas sebagai Penghambat Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Suku Bajo*. 67–76.
- Nababan, J., & Situmeang, L. (2022). Enhancing students ' learning creativities through the application of literacy learning model in the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) curriculum program. *Journal of Applied Linguistics and Literature*, 7(2), 478–488.
- Naing, N., & Hadi, A. K. (2022). Model Kolaborasi Pembelajaran Riset Rekonstruksi Sarana Dan Prasarana Berbasis Smart Settlement Untuk Mitigasi Bencana Banjir Pada Program MBKM Jalur Proyek Kemanusiaan Abstrak. *Jurnal Arsitektur, Kota Dan Pemukiman*, 7(1), 83–97.
- Nita, C. I. R., et al. (2022). Analisis Dampak Implementasi Kurikulum MBKM PGSD UNIKAMA Terhadap Kearifan Lokal. *Jurnal Publikasi Pendidikan*, 12(1), 42–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/publikan.v12i1.30111>
- Novianti, N. A. (2017). Usaha Berbasis Rumah Tangga Nelayan pada Permukiman Suku Bajo di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. In *Program Studi Pendidikan Geografi Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar* (Vol. 87, Issue 1,2). Universitas Negeri Makassar.
- Nurkholis, A. (2018). *Mengenal Pusat Kebudayaan Maritim: Suku Bajo, Suku Bugis, Suku Buton, Suku Mandar Di Segitiga Emas Nusantara*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/t2xup>
- Nurul Bariyah. (2022). Pendidikan, Kesehatan dan Penanggulangan Kemiskinan di Kalimantan Barat: Menuju Sustainable Development Goals. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(1), 93–110.
- Nyoman Ruja. (2022). Kemiskinan dan Perubahan Sosial: Sebuah Medel Transformasi Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(3), 572–579.
- R, E. K., & Nusanto, B. (2022). Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa Wisata di Desa Kemiri Kabupaten Jember. *Journal of Community Development*, 3(2), 199–210. <https://doi.org/10.47134/comdev.v3i2.101>
- Rahmi, Z., Yunus, B., & Lokal, K. (2022). Kurikulum Berbasis Al-Qur'an dan Kearifan Lokal: Re Thinking terhadap implementasi MBKM di IAIN Lhokseumawe. *Muhkamat*, 1(1), 1–17.
- Rizky Rinalidy, R. J. (2020). Kewajiban Negara dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Quarterly Journal of Health Psychology*, 8(32), 73–92.
- Rodiyah, R. (2021). Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Digital dalam

- Menciptakan Karakter Mahasiswa Hukum yang Berkarakter dan Profesional. *Jurnal Nasional Hukum*, 7(2), 425–434.
- Rustan, Surya, B., & Nasution, M. A. (2018). Adaptasi dan Perubahan Sosial Kehidupan Suku Bajo. *Urban and Regional Studies Journal (URSJ)*, 1(1), 31–37. <https://journal.unibos.ac.id/ursj/article/view/60>
- Sopiansyah, D. et al. (2022). Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1), 34–41. <https://doi.org/10247476/reslaj.v4i1.458> Konsep
- Sri Suryanti Nur. (2004). *Pola Penguasaan dan Pemanfaatan Wilayah Perairan Pesisir Secara Turun-Temurun oleh Suku Bajo*. 978–979.
- Sudarsana, I. K. D. K. (2020). *Ajaran Catur Guru dalam Penguatan Karakter Peserta Didik*. 20(20), 85–91.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. In *Alfabet*.
- Surya, B., & Nasution, M. A. (2018). *Adaptasi dan Perubahan Sosial Kehidupan Suku Bajo Riattang Timur Kabupaten Bone*). 1(1), 31–37.
- Susilowati, E. (2018). Etnis Maritim dan Permasalahannya. *Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Abstract*, 7(1), 1–18.
- Suyuti, N. (2004). *BAJO DAN BUKAN BAJO Studi Tentang Perubahan Makna Sama dan Bagai pada Masyarakat Bajo di Desa Sulaho Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara* [Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya]. <http://repository.unair.ac.id/32583/>
- Suyuti, N. (2006). Interaksi Orang Bajo dan Orang Bugis dalam Konteks Kearifan Lokal–Global di Desa Sulaho, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. *Jagad Bahari Nusantara*, 1(1), 37–58.
- Topan, Wahyu, M. & Y. (2017). Peran Optimalisasi Pemberdayaan Nelayan terhadap Peningkatan Usaha (Studi pada KUB-KUB Nelayan di Kabupaten Pati). *Jurnal Teknikom*, 1(1), 19–30.
- Ulfah Fajarini. (2014). Peranan Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter. *SOSIO-DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 1(2), 123–130. <https://doi.org/10.15408/sd.v1i2.1225>
- Umar, R., & Syarif, E. (2019). *Strategi Bertahan Hidup dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Suku Bajo di Daratan Tanete Riattang Timur Kabupaten*. 142–147.
- Yanuarsari, R., Asmadi, I., Muchtar, H. S., & Sulastini, R. (2021). Peran Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Meningkatkan Kemandirian Desa. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 6307–6317. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1828>
- Yuherman, Y., Nugroho, W., & Sunarsi, D. (2021). Dampak Kebijakan MBKM Pada Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas Fakultas Hukum Usahid Jakarta. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 222. <https://doi.org/10.52947/morality.v7i2.235>
- Zaini, A. (2010). Kemiskinan di Daerah Kaya Sumberdaya Alam, Sebuah Paradoks Pembangunan. *Jurnal Borneo Administrator*, 6(1), 1–19.
- Zamzami, L. (2016). *Dinamika Pranata Sosial Terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Dalam Melestarikan Wisata Bahari*. 18(1), 57–67.